

**KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
(STUDI BANDING: UMKM DI KOTA DEPOK DAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

TESIS

Oleh

**BINTON JHONSON NADAPDAP
(2402198016)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (STUDI BANDING: UMKM
DI KOTA DEPOK DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

BINTON JHONSON NADAPDAP

(2402198016)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binton Jhonson Nadapdap

NIM : 2402198016

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (STUDI BANDING: UMKM KOTA DEPOK DAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA)”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2026

Materai Rp 10.000



Binton Jhonson Nadapdap

NIM: 2402198016



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
(STUDI BANDING: UMKM KOTA DEPOK DAN DAERAH ISTIMEWA
YOGJAKARTA)”**

Oleh:

Nama : Binton Jhonson Nadapdap

NIM : 2402198016

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis
guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Wiwik Sri Widiartv, S.H., M.H.

NIP/NUPTK: 141104/4259743644230083


Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

NIP/NUPTK: 141153/0362743644130093

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paldiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 31 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Binton Jhonson Nadapdap
NIM : 2402198016
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (STUDI BANDING: UMKM KOTA DEPOK DAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA)"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 31 Januari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Binton Jhonson Nadapdap

NIM : 2402198016

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (STUDI BANDING: UMKM KOTA DEPOK DAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA)”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 31 - Januari 2026

Materai



Binton Jhonson Nadapdap
NIM: 2402198016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Politik Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Banding: UMKM Di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Penelitian ini dibuat disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama belajar di program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh para dosen pembimbing dan juga orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. David M. L. Tobing, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia (YUKI), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. **Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menempuh pendidikan pada Program Magister Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. **Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. **Dr. Paltiada Saragi, SH., M.H.** selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. **Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H** selaku pembimbing I yang secara konsisten mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. **Dr. Binoto Nadapdap, SH., M.H.** selaku selaku pembimbing II yang terus mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Magister Hukum atas ilmu dan bimbingan selama penulis menjalani studi di Prodi MH UKI.
8. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2024 MH UKI yang selalu memberikan dukungan positif dan memberikan kesempatan untuk maju berkarya.
9. Istri dan anak - anak saya tercinta, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta,2025

Penulis

Binton Jhonson Nadapdap

2402198016



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1) Tujuan Penelitian.....	8
2) Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep.....	14
a) Politik Hukum.....	14
b) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	15
c) Perekonomian Indonesia (Perekonomian Berkeadilan).....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Orisinalitas Penelitian.....	30

G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan dan Pengertian Umum dan Konsep UMKM.....	35
B. Kebijakan pada UMKM	37
C. Politik Hukum di Sektor UMKM.....	38
D. Teori Keadilan John Rawls Terhadap UMKM	40
E. Teori Politik Hukum Terhadap UMKM	41
F. Teori Ekonomi Mikro dan Pembangunan Berkeadilan Terhadap UMKM	42
G. Ekonomi Berkeadilan Terhadap UMKM	43
BAB III POLITIK HUKUM UMKM PADA PEREKONOMIAN	
 INDONESIA	45
A. Politik Hukum UMKM terhadap Perekonomian Indonesia	45
B. PP Nomor 47 Tahun 2024 sebagai Instrumen Politik Hukum: Penghapusan Piutang Negara untuk UMKM	50
C. Peraturan Daerah: Depok dan DIY (Yogyakarta).....	52
D. Studi Empiris dan Implementasi Politik Hukum UMKM di Kota Depok	54
E. Politik Hukum dan Hambatan Struktural Bagi UMKM.....	56
F. Analisis perbandingan kebijakan.....	58
G. Rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat UMKM.....	60
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN	
 POLITIK HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DI KOTA	
 DEPOK.....	64
A. Kondisi Sosial Ekonomi UMKM Kota Depok.....	64
1. Karakteristik UMKM di Depok.....	64

2. Data Jumlah dan Pertumbuhan UMKM	67
3. Kesenjangan Akses dan Pemerataan	68
B. Faktor Regulasi dan Kelembagaan Hukum.....	68
C. Faktor Ekonomi dan Aksesibilitas.....	69
D. Faktor Sosial dan Kultural.....	70
E. Faktor Teknologi dan Digitalisasi	71
F. Temuan Lapangan Melalui Wawancara dan Observasi.....	72
1. Pandangan Ketua DPRD Kota Depok	72
2. Pandangan Wali Kota Depok.....	72
3. Pandangan Ketua Komisi B DPRD Depok.....	73
4. Pandangan Kepala DKUM Kota Depok	74
G. Implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024 dan Persoalan Kredit Macet UMKM.....	75
H. Analisis Politik Hukum terhadap UMKM di Kota Depok	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya tidak memiliki hambatan yang datang seperti kereta barang dari sistem sekitarnya seperti kegagalan menetapkan kebijakan hukum yang jelas dan peraturan yang rumit. Kami berharap dapat menemukan cermin yang realistis antara regulasi di Daerahnya Yogyakarta dan Studi Banding UMKM di kota Depok tentang politik hukum dengan kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional Indonesia. Dampak iklim politik di tingkat negara bagian dan nasional terhadap legislasi UMKM terlebih dahulu diteliti, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan daerah.

Dengan menggunakan metodologi yuridis-normatif dan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan kasus hukum terkait kota Depok serta wawancara mendalam dengan tokoh UMKM setempat, pejabat pemerintah dan legislator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum kebijakan Depok terhadap UMKM masih bias dan eksklusif. Meski sudah ada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021, namun kebijakan komprehensif tanpa peraturan daerah (Perda) yang mengakomodir UMKM masih dalam tahap awal pembangunan. Sebaliknya, DIY telah memiliki kebijakan yang komprehensif seperti Perda nomor 6 tahun 2022 dan Pergub nomor 58 tahun 2023 mulai dari undang-undang yang tegas hingga insentif fiskal, perlindungan hukum, dan akses pinjaman. Langkah signifikan untuk mengatasi hambatan akses permodalan dari catatan buruk di SLIK OJK telah dilakukan di tingkat nasional melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang pemberantasan kredit macet UMKM. "Untuk kebangkitan UMKM, kebijakan ini merupakan campuran hukuman dan promosi untuk mengulurkan tangan membantu. Pembangunan ekosistem UMKM yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan melibatkan reformasi politik hukum berbasis keadilan distributif (Rawls theory) reaktivitas legislasi UMKM dengan memberdayakan konteks lokal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Politik Hukum, UMKM, Perekonomian, Reformasi Regulasi

ABSTRACT

Micro, small and medium-sized businesses (MSMBs) should not have obstacles that come like a freight train from the surrounding system such as failure to set clear legal policy and complex regulations. We will expect to find a realistic mirror between regulations in the D.I.Y Special Region of Yogyakarta and Comparative Studies in the city of Depok on legal politics MSMEs with its contribution to drive national economy Indonesia. The impact of the political climate at the state and national level on MSME legislation is first examined, then considerations that influence regional policymaking.

Utilizing a juridical-normative and juridical-empirical methodology, this study examines the bylaws and case law related to Depok city as well as in-depth interviews with local MSME figures, government officials and legislators.

The results indicate that the legal approach of Depok policies to MSMEs is still biased and exclusivist. Although there is a Mayor Regulation Number 15 the Year 2021, but the comprehensive policy without local regulations (Perda) that accommodated MSMEs is still in its early stages of development. On the contrary, DIY has had a comprehensive policy such as Perda number 6 of 2022 and Pergub number 58 of 2023 from forceful laws to fiscal incentives, legal protections, and loan access. A significant step to overcome barriers for capital access from bad records in the OJK SLIK has been made at the national level through the enactment of Government Regulation Number 47 Year 2024 regarding eradication of MSME bad credit. "For the revival of MSMEs, this policy is a mixed bag of punishment and promotion to lend a helping hand. Construction of a MSME ecosystem that is inclusive, responsive and sustainable involve reforming distributive justice-based legal politics (Rawls theory) reactivity the legislation of MSME by empowering the local context the synergy between central and local government.

Keywords: *Legal Politics, UMKM, Equitable Economy, Regulatory Reform*